



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

Pages: 2351-2361

Tahap-Tahap Penyelesaian Konflik Studi Kasus Suku Hutu dan Tutsi di Rwanda

Rizal Adlan Mustafa

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister
DOI	: https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2258

How to Cite this Article

APA	: Adlan Mustafa, R. (2024). Tahap-Tahap Penyelesaian Konflik Studi Kasus Suku Hutu dan Tutsi di Rwanda. <i>Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research</i> , 1(4), 2351 - 2361. https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2258
Others Visit	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Tahap-Tahap Penyelesaian Konflik Studi Kasus Suku Hutu dan Tutsi di Rwanda

Rizal Adlan Mustafa^{1*}

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia¹

*Email Korespondensi: rizal.mustafa@students.paramadina.ac.id

Diterima: 27-09-2024

| Disetujui: 28-09-2024

| Diterbitkan: 29-09-2024

ABSTRAK

Genosida yang menewaskan ratusan ribu jiwa yang terjadi di Rwanda berawal dari sejarah panjang. Negara tersebut dihuni oleh suku Hutu yang menjadi mayoritas disana, kemudian Tutsi dan suku terkecilnya adalah Twa. Mereka hidup berdampingan dan damai selama ratusan tahun sampai Jerman menjadikannya bagian dari provinsi negara tersebut pada tahun 1895. Kondisi berubah pada saat Perang Dunia I pecah yang menjadikan Jerman harus kehilangan wilayah Rwanda, kemudian ditetapkan oleh LBB bahwa Rwanda dibawah administrasi negara Belgia. Saat menguasai Rwanda, Belgia lebih mengutamakan suku Tutsi daripada Hutu dalam segala bidang karena dianggap lebih maju, kaya, dan unggul. Sikap membedakan-bedakan antar suku ini mengakibatkan ketegangan antara kedua belah pihak, kemudian bersaing untuk menjadi pemimpin. Sentimen kesukuan ini akhirnya berujung kepada konflik yang berkepanjangan dan berakhir dengan pembantaian yang menewaskan 800.000 orang. Untuk mengukur eskalasi konflik tersebut, penelitian ini menggunakan teori kurva konflik Michael Lund (1996) yang membagi konflik kedalam beberapa fase, yaitu: Durable peace, stable peace, unstable peace, crisis, dan war. Kelima fase tersebut akan digunakan untuk mengukur eskalasi konflik yang terjadi antara suku Tutsi dan Hutu di Rwanda. Penelitian ini, menggunakan metode eksplanatif-kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian dianalisis sedemikian rupa, sehingga menghasilkan penelitian yang mampu menafsirkan objek yang diteliti secara mendalam.

Katakunci: Hutu, Tutsi, Konflik, Genosida.

ABSTRACT

The genocide that killed hundreds of thousands of people in Rwanda has its origins in a long history. The country is inhabited by the Hutu tribe, which is the majority there, then the Tutsi, and the smallest tribe is the Twa. They lived side by side and peacefully for hundreds of years until Germany made it part of the country's province in 1895. Conditions changed when World War I broke out, which resulted in Germany having to lose the territory of Rwanda. It was then determined by the LBB that Rwanda was under the administration of the Belgian state. When controlling Rwanda, Belgium prioritized the Tutsis over the Hutu in all fields because they were considered more advanced, richer, and superior. This discriminatory attitude between tribes resulted in tension between the two parties, which then led to competition to become leaders. This tribal sentiment ultimately led to a prolonged conflict that ended with a massacre that killed 800,000 people. To measure conflict escalation, this research uses Michael Lund's (1996) conflict curve theory, which divides conflict into several phases, namely: durable peace, stable peace, unstable peace, crisis, and war. These five phases will be used to measure the escalation of the conflict between the Tutsi and Hutu tribes in Rwanda. This research uses an explanatory-qualitative method by collecting data from various sources. In addition, it is analyzed in such a way as to produce research that is able to interpret the object being studied in depth.

Keywords: Hutu, Tutsi, Conflict, Genocide.

PENDAHULUAN

Konflik bersifat sangat dinamis dan intensitasnya selalu berubah dari masa ke masa. (Wohlfeld. 2010, hlm. 14) Dunia terlihat seperti sangat berbahaya dengan adanya berbagai macam konflik, peperangan, terorisme dan perang melawan terorisme telah merenggangkan hubungan antara Muslim dan Barat, antara satu negara dengan organisasi atau negara lainnya. Persaingan bahkan perang antar negara yang saling merebutkan suatu wilayah yang memiliki sumber minyak dan sumber daya alam lainnya. (John Mueller, 1989) Adanya senjata pemusnah masal, degradasi lingkungan, perubahan iklim, pertumbuhan pendudukan kemiskinan, globalisasi dan peningkatan kesejahteraan juga sangat berisiko untuk menimbulkan konflik di masa depan.

Pasca perang dingin, banyak negara-negara di dunia yang sadar bahwa konflik hanya akan menimbulkan ancaman besar bagi keamanan regional dan stabilitas global, menghabiskan biaya yang sangat besar, serta dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. (Lund. 2015, hlm. 3). Ketika suatu negara gagal menciptakan perdamaian di negaranya, bukan hanya menimbulkan konflik dan bencana kemanusiaan, tetapi juga akan menjadi tempat bersemayamnya terorisme di dalamnya. Sehingga organisasi internasional seperti PBB, NGO, dan berbagai institusi lainnya berusaha untuk menghentikan peperangan intranegara kemudian membangun kembali masyarakat yang telah dilanda perang.

Organisasi-organisasi internasional saat ini melakukan berbagai usaha untuk menjaga perdamaian, menengahi perjanjian damai, membantu korban perang, memperbaiki struktur masyarakat, dan membantu membangun kembali sebuah negara. (Lund. 2015, hlm. 4) sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tahapan-tahapan resolusi konflik dan pentingnya untuk menjaga perdamaian dengan studi kasus genosida yang terjadi antara suku Hutu dan suku Tutsi di Rwanda.

Literature review pertama adalah penelitian dari Howard Adelman, York University, Kanada. Penelitian Howard yang diterbitkan pada bulan maret 1996 berjudul *"The international Response to Conflict and Genocide Lessons from the Rwanda Experience"*, menjelaskan tentang awal mula perang saudara terjadi yang membuat banyak warga sipil menjadi korban, dan tanggapan internasional terhadap konflik tersebut. Penelitian Howard juga membahas tentang krisis, manajemen konflik, pengungsian, keamanan dan Hak Asasi Manusia. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan di diskusikan dalam tulisan ini adalah topik pembahasannya dan metode yang disajikan. Penelitian yang baru ini menggunakan Kurva fase-fase resolusi konflik yang digagas Michael Lund (1996), yang menjabarkan secara rinci tahap-tahap penyelesaian konflik antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda.

Literatur review kedua berjudul *"The Rwandan Conflict, Origin, Depelopment, Exis Strategies"* yang ditulis Dr. Anastase Shyaka. Studi Anastase dipesan langsung oleh *The National Unity and Reconciliation Commission* yang membahas tentang faktor-faktor penyebab konflik di Rwanda yang berakar dari banyak permasalahan. Diantaranya kolonisasi dan misionaris gereja, mitos *Hamitik*, faktor ideologi, etno-rasial, kepalsuan batas negara, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang buruk, ketidakadilan, dan pola demokrasi yang menimbulkan perpecahan partisan. Selain itu, ia juga membahas tantangan, strategi, dan peluang berkelanjutan tentang perdamaian di Rwanda. Perbedaan tulisan Anastase dengan penelitian ini adalah pola yang disampaikan. Anastase membahas banyak hal dari berbagai macam sudut pandang dengan tidak menggunakan kurva konflik. Selain itu, diskusi di dalam penelitian baru ini juga memberikan berbagai macam contoh dari konflik-konflik lain yang pernah terjadi di dunia.

Penelitian ini, menggunakan teori kurva konflik Michael Lund. Menurut Michael Lund (1996) menjelaskan bahwa untuk mencapai sebuah perdamaian tidak mesti di ciptakan saat peperangan sedang

terjadi dan juga tidak mesti harus diakhiri saat peperangan sudah berakhir. Sebuah perdamaian merupakan sebuah proses yang panjang, Lund di dalam bukunya *Preventing Violent Conflicts: A Strategy for Preventive Diplomacy* menggambarkan bagaimana sebuah konflik dapat berupa kekerasan, dan non-kekerasan, dan bagaimana penggunaan kekerasan di dalam konflik cenderung naik dan turun seiring berjalannya waktu.

Kurva yang dijelaskan Lund juga membantu untuk mengatur istilah dan konsep yang digunakan untuk manajemen konflik, menunjukan bagaimana fase-fase konflik yang berbeda tetapi berhubungan satu sama lain dan dengan berbagai jenis intervensi pihak ketiga di dalamnya. Berikut adalah kurva tahap-tahap dan resolusi konflik menurut Lund:

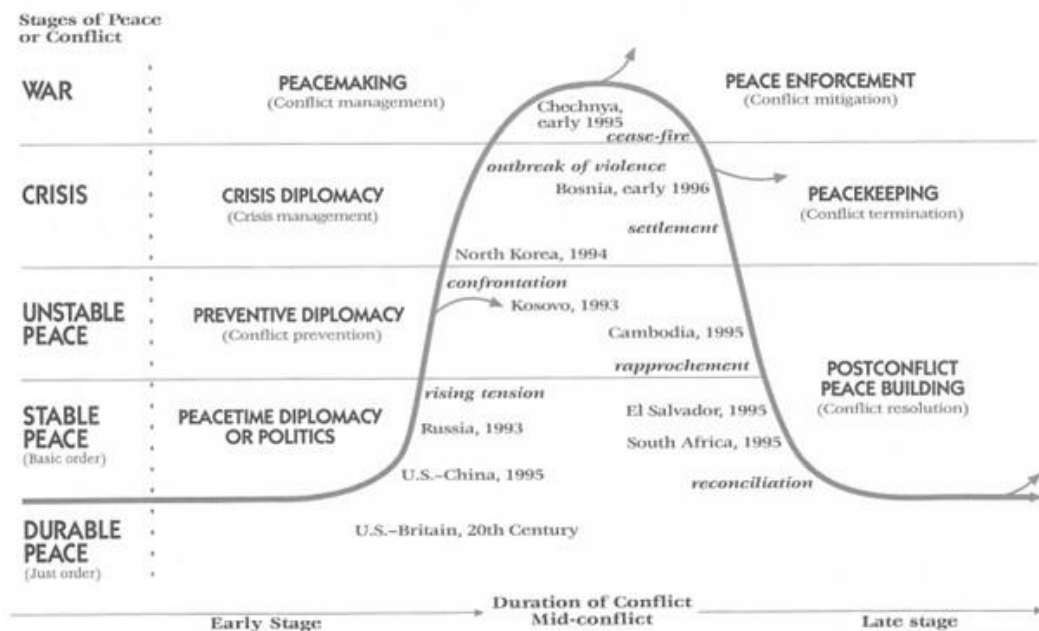


Table 1 Sumber: Michael S. Lund. *Preventing Violent Conflicts: A Strategy for Preventive Diplomacy* (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1996), p.38.

Lund (1996) menjelaskan bahwa garis yang membentuk bujur dari kiri ke kanan dan melintasi diagram adalah gambaran tentang jalannya konflik dan dinamika intensitasnya yang naik dan turun seiring berjalannya waktu. Sedangkan kolom di sebelah kiri menggambarkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa dibagi menjadi beberapa fase perdamaian atau konflik (*peace or conflict*), perdamaian bertahan lama (*Durable Peace*), perdamaian stabil (*Stable Peace*), perdamaian tidak stabil (*Unstable Peace*), krisis (*Crisis*), dan perang (*War*). (Lund. 1996)

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang tahap-tahap penyelesaian konflik ini menggunakan metode eksplanatif-kualitatif dengan berbagai sumber referensi. Metode eksplanatif digunakan untuk memaparkan korelasi kasual antara variabel-variabel yang ada dengan melakukan pengujian hipotesis. Bungin (2001: 51) menjelaskan bahwa metode ini digunakan untuk menjabarkan hubungan antar variabel untuk menguji sebuah hipotesa, kemudian hasilnya digeneralisasikan terhadap semua populasi yang ada. Sedangkan, metode kualitatif

menggunakan pendekatan pengumpulan data, kemudian data tersebut dieksplorasi dan diuji dengan teori atau hipotesis. (Bryman. 1988.). Metode ini berusaha memahami kemudian menafsirkan objek yang diteliti secara mendalam.

Bogdan dan Taylor (1982) dalam Zuchri (2021, hlm 30) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebuah kaidah penelitian untuk mendapatkan data dalam bentuk tertulis atau perkataan yang bersumber dari sumber terpercaya dan skema tulisannya diarahkan secara holistik. Sedangkan Kirk dan Miller memaparkan bahwa dalam penelitian ini merupakan kultur dalam ilmu sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri. Metode ini mengembangkan konsep sensitivitas terhadap apa yang terjadi, menerangkan realitas yang berkaitan satu sama lain dengan penelusuran teori dan mengembangkan pemahaman berbagai macam fenomena yang terjadi.

Konsep dasar metode penelitian kualitatif adalah menggali dan menafsirkan makna yang berakar dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya krusial seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna data. (Creswell. 2009, hlm. 4). Untuk memahami tahap-tahap penyelesaian konflik dengan studi kasus suku Hutu dan Tutsi di Rwanda, maka penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini digunakan untuk mencari sumber data yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan secara spesifik, dianalisis sedemikian rupa, kemudian disajikan secara eksplanatif dan terperinci di dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Resolusi Konflik

1. Durable Peace

Sesuai dengan namanya '*durable peace*', perdamaian yang bertahan lama adalah perdamaian yang abadi. Secara garis besar, perdamaian ini terjadi dari waktu ke waktu, direpresentasikan sebagai garis datar yang relatif panjang. Lund (1996) menjelaskan bahwa perdamaian yang tahan lama melibatkan timbal balik dan kerjasama yang tinggi, dan tidak adanya tindakan pembelaan diri diantara pihak-pihak terkait, walaupun terdapat aliansi militer untuk melawan ancaman bersama. Sebuah perdamaian yang abadi dapat terealisasi jika memiliki nilai-nilai bersama, tujuan, dan institusi (misalnya sistem politik yang sama-sama demokratis dan supremasi hukum), saling ketergantungan di bidang ekonomi dan saling memahami satu sama lain di komunitas internasional.

Tahap pertama ini merupakan tahap preventif yang menginginkan perdamaian (*Quo Desidated Pacem*) dan harus mempersiapkan perdamaian (*Praeparet Pacem*). (Widjayanto. 2004, hlm. 44) Pada tahap ini, setiap masyarakat ikut andil dalam menjaga perdamaian, tujuan utamanya adalah pencegahan terjadinya konflik yang dapat menimbulkan kekerasan, dan mewujudkan perdamaian itu sendiri. Kedua tujuan utama tersebut dapat di realisasikan dengan mempersiapkan indikator sistem peringatan dini (*early warning system*) agar perdamaian tetap kekal abadi.

Contoh *durable peace* adalah hubungan antara Amerika Serikat dan Kanada di abad ke-20 yang sangat erat karena letak geografisnya berdekatan, memiliki kepentingan politik yang serupa, dengan budaya yang mirif serta hubungan diplomatis dan ekonomi yang sangat kuat. Contoh lainnya adalah hubungan antar negara-negara Uni Eropa yang menjadi organisasi kawasan paling efektif dan solid sampai hari ini. Perdamaian yang langgeng ini dapat terjadi walaupun berbagai permasalahan muncul dan perselisihan

terjadi. Namun, semua masalah yang ada akan diselesaikan melalui jalur diplomasi atau politik damai, tujuannya adalah untuk memelihara dan memperkuat hubungan agar keamanan dan perdamaian tetap stabil.

2. Stable Peace

Antara *durable peace* dengan *stable peace* memang agak sulit dibedakan, karena sama-sama damai/peace. Kedamaian yang stabil dalam kosa kata Lund merupakan perdamaian yang bekerja dengan baik tetapi tidak memiliki pondasi yang kuat di dalamnya. Jika dianalisis, dalam *stable peace* Lund mengungkapkan bahwa terdapat beberapa titik masalah potensial yang harus diperhatikan untuk memahami apakah itu perdamaian yang stabil atau mulai bergerak ke tahap ketidakstabilan.

Lund (1996) menjelaskan bahwa perdamaian yang stabil (*stable peace*) artinya dingin (*cold*) merupakan hubungan kerjasama dan saling berkomunikasi tetapi tetap saling mewaspada satu sama lainnya. Kerjasama dilakukan dengan tujuan kestabilan nasional. Kerjasama dalam *stable peace* memiliki perbedaan nilai dan tujuan, serta tidak ada kerjasama militer yang terjalin. Jika terjadi perselisihan biasanya diselesaikan dengan cara tanpa kekerasan, permasalahannya dapat di prediksi dan diselesaikan, serta prospek untuk terjadinya peperangan masih rendah.

Tahap kedua ini merupakan resolusi konflik yang menyertakan berbagai macam aktor non-militer. Menurut Aal (1996) sistem peringatan dini di tahap preventif diperlukan untuk menyiapkan ruang bagi masyarakat untuk ikut andil sebagai aktor resolusi konflik, dan meminimalisir kemungkinan masuknya peran militer dalam mengelola konflik. Masyarakat yang terlibat bertujuan untuk menghindari potensi terjadinya konflik bersenjata antarpihak yang saling berseteru. Masyarakat sipil mengambil peran aktif seperti mendesak negara untuk menangkai sebuah konflik (*deterrence*), atau pencegahan dini (*preemption*), atau dengan embargo ekonomi dan isolasi politik. (Widjajanto. 2003, hlm. 45)

Contoh konkrit dari *stable peace* adalah *détente* antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat perang dingin di tahun 1960-an, dan hubungan Amerika Serikat dan Rusia saat ini juga termasuk kedalam *stable peace*. Selain itu, apa yang terjadi di Afrika Selatan dari tahun 1994-1995 merupakan kesepakatan politik nasional diantara fraksi-fraksi politik yang saling bersaing dan terkadang bermusuhan satu sama lain, merupakan kesetaraan domestik dari perdamaian yang stabil.

3. Unstable Peace

Apabila perselisihan ternyata tidak dapat diselesaikan dan ketegangan terus meningkat, konflik yang terjadi dari waktu ke waktu akan memasuki fase yang dikenal dengan perdamaian yang tidak stabil (*unstable peace*). Lund (1996) menjelaskan bahwa *unstable peace* merupakan situasi dimana ketegangan dan kecurigaan di antara pihak-pihak terkait semakin meningkat, tetapi kekerasan belum terjadi atau hanya sporadis. *Unstable peace* berlaku walaupun angkatan bersenjata tidak dikerahkan dan terjun ke lapangan, tetapi setiap pihak menganggap satu sama lain adalah musuh dan menyiapkan pertahanan militer sebagai upaya pencegahan. Walaupun keseimbangan kekuatan (*balance of power*) dapat mencegah sebuah agresi, tetapi krisis dan perang masih mungkin dapat terjadi.

Pada tahap ketiga ini didominasi dengan banyaknya operasi militer. Walaupun intervensi pihak militer sangat besar dan berpotensi menggunakan kekerasan, masyarakat sipil harus menyuarakan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan tegas menyuarakan bahwa operasi militer tidak akan bisa mengakhiri konflik dan operasi militer yang dilancarkan seharusnya merefleksikan misi perdamaian.

Contoh kondisi dari *unstable peace* adalah hubungan antara Amerika Serikat dan Iran pada tahun 1995. Sedangkan versi domestik dari perdamaian yang tidak stabil termasuk represi pemerintah terhadap kelompok oposisi terjadi di Myanmar pada tahun 1995. Selain itu, pada tahun 1989-1991 di Yugoslavia

juga terjadi gejolak politik yang bergerak semakin dekat menuju perpecahan dan disintegrasi negara. Para pemimpin di setiap wilayah bekas republik Yugoslavia saling menuduh melakukan tindakan kriminal, saling menuduh beritikad buruk, inkar janji, dan menuduh diskriminasi antar suku, serta saling tuduh represif politik satu sama lain.

4. Crisis

Fase krisis (*crisis*) dimulai apabila diplomasi preventif dan pencegahan krisis tidak berhasil, ketegangan semakin meningkat dan terjadi berbagai jenis konfrontasi. Lund (1996) menjelaskan bahwa Krisis adalah konfrontasi atau ketegangan antara angkatan bersenjata yang dimobilisasi dan siap untuk berperang satu sama lain. Bahkan mungkin terlibat ke dalam ancaman dan pertempuran skala kecil yang tidak intens dan belum mengerahkan kekuatan militer yang signifikan. Pada saat situasi krisis, kemungkinan pecahnya perang sangat tinggi.

Tahap ke empat ini perlu diterapkannya misi kemanusiaan agar dapat meminimalisir korban konflik. (Anderson. 1996) Prinsip *mid-war operations* juga perlu diterapkan untuk mengintervensi misi kemanusiaan. (Leoscher dan Dwoty. 1996; Widjajanto. 2003). Masyarakat sipil dalam misi kemanusiaan harus mampu mencapai ke tengah-tengah wilayah perang. Untuk itu, masyarakat sipil harus memiliki kemampuan *civic mid-war operations*, yaitu kemampuan yang sejajar dengan militer untuk meluncurkan aksi kemanusiaan.

Contoh dari krisis seperti yang terjadi di Kuba pada tahun 1962. Krisis rudal Kuba yang terjadi membuat Amerika Serikat, Kuba, dan Rusia mengerahkan pasukan dan meningkatkan status waspada pasukan di seluruh wilayah. Kekerasan politik berkelanjutan juga pernah terjadi di Kolombia pada tahun 1995 yang berakibat pada fase krisis domestik.

5. War

Fase perang (*war*) akan terjadi apabila upaya diplomasi saat krisis tidak berhasil, sehingga memungkinkan akan terjadi pecahnya kekerasan dan konflik memasuki masa peperangan. Lund (1996) menjelaskan bahwa perang berkelanjutan adalah pertempuran antara angkatan bersenjata yang terorganisir. Hal ini dapat bervariasi, diawali dari konflik berintensitas rendah tetapi terus berlanjut sampai perang besar terjadi secara menyeluruh. Saat kekerasan atau kekuatan bersenjata digunakan secara signifikan, maka konflik sangat rentan memasuki tingkat yang paling besar secara habis-habisan. Karena masing-masing pihak merasa semakin dibenarkan untuk menggunakan kekerasan kepada pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Contoh konflik besar adalah Perang Vietnam dengan Amerika Serikat, dan Perang Dunia II. Selain itu juga terdapat jenis anarki sipil yaitu konflik di Chechnya pada awal tahun 1995 dan setelahnya, konflik di Somalia pada tahun 1992 dan Aljazair pada tahun 1995. Konflik besar yang terbaru di abad ini adalah perang antara Rusia dan Ukraina, serta konflik antara Israel dengan Palestina.

Apabila perang semakin berkecamuk, terdapat salah satu organisasi internasional yang ikut andil selama masa perang, yaitu *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, ICRC adalah organisasi internasional yang bersifat independen dan netral. Memiliki peran untuk memastikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan berbagai situasi kekerasan lainnya. (ICRC.org) Selain itu, juga terdapat organisasi ataupun pihak-pihak lainnya yang berusaha untuk mengakhiri sebuah konflik dan dikenal dengan *Peacemaking* atau *Conflict Management*. Jika kesepakatan untuk mengakhiri peperangan dapat dicapai, maka pihak luar tersebut kemudian dapat terlibat ke dalam Penegakan *Peace Enforcement* atau *Conflict Mitigation*.

A. Post-War dan Pentingnya Menjaga Perdamaian

Apabila upaya *peacemaking* and *peace enforcement* berhasil, maka eskalasi pertempuran akan dapat mereda. Gencatan senjata dapat terjadi agar dapat membantu mengurangi ketegangan dan memindahkan hubungan dari keadaan perang kembali ke keadaan krisis. Pada tahap ini, upaya untuk menjaga agar eskalasi konflik tidak meningkat kembali biasanya disebut dengan *Peacekeeping* dan *Conflict Termination*.

Para pihak yang berseteru dapat memasuki proses yang sulit dari resolusi konflik (*conflict resolution*) dan pembangunan perdamaian pasca konflik (*Post-conflict Peace Building*). Melalui proses ini, ketegangan antar pihak dapat dikurangi, dan dapat memasuki tahap perdamaian yang stabil (*stable peace*) dan perdamaian yang bertahan lama (*durable peace*).

Kondisi dari perang (*war*), menuju ke (*durable peace*) memang sangat sulit tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Lund (1996) memberikan contoh Bosnia pada tahun 1996 sebagai contoh konflik yang berpindah dari perang ke krisis (*crisis*), kemudian yang terjadi di Kamboja pada tahun 1995 sebagai konflik yang bergerak dari krisis ke perdamaian yang tidak stabil (*unstable peace*), dan Afrika Selatan pada tahun 1995 merupakan konflik yang bergerak dari perdamaian yang tidak stabil ke perdamaian yang stabil (*stable peace*).

Perdamaian (*peace*) memang diperoleh dengan berbagai upaya yang sulit agar dapat terurai. Saat perdamaian sudah tercapai, terkadang ketegangan dapat dan sering kali meningkat kembali. Sehingga disini pentingnya peran dan keterampilan para praktisi untuk mengkonsolidasi perdamaian untuk mencegah terulangnya kembali sebuah konflik kekerasan.

Pembahasan

Analisis Konflik Di Rwanda Dalam Kurva Konflik

Rwanda merupakan negara kecil di Afrika Tengah yang terkurung daratan dan menjadi tempat tinggal bagi sekitar 12 juta orang. Secara historis, negara Rwanda memiliki tiga kelompok masyarakat yang secara strata sosial berbeda, yaitu suku Hutu (84%) dan menjadi mayoritas disana, kemudian Tutsi (15%) dan Twa yang jauh lebih kecil (hanya 1%). Terdapat perbedaan secara sosial antara ketiga suku tersebut. Suku Tutsi merupakan kelompok masyarakat yang kaya dan berkuasa, sedangkan suku Hutu dihuni oleh kelompok masyarakat bawah dan miskin. Sedangkan suku Twa secara tradisional merupakan penduduk asli negara ini, dan menjadi kelompok marginal dalam masyarakat Rwanda.

Menurut sejarah yang ditulis oleh *African Studies Center*, diperkirakan suku Hutu datang ke Rwanda dan Burundi saat ini dari abad ke-5 dan ke-11 Masehi. Mereka adalah petani skala kecil yang struktur sosialnya berdasarkan marga. Raja, atau Bahinza sebagai pemimpin beberapa klan Hutu dan dianggap sebagai pelindung tanaman dari serangga, melindungi ternak dari penyakit dan dapat menyebabkan hujan. Sedangkan suku Tutsi pertama kali bermigrasi ke wilayah tersebut sekitar abad ke-14 Masehi secara berangsur-angsur dan damai. Suku Tutsi memiliki keterampilan lebih dari suku Hutu, mulai dari kepemilikan ternak, keterampilan berperang, dan berhasil mengontrol ekonomi, politik, dan sosial atas suku Hutu. Akhirnya kepemilikan tanah diambil alih dari suku Hutu menjadi milik Raja Tutsi, atau Mwami.

Suku Hutu dan Tutsi hidup berdampingan, saling berinteraksi satu sama lain, memiliki budaya dan bahasa yang sama, dan kadang-kadang menikah. (Human Rights Watch. 2006) Walaupun dipimpin oleh Mwami, saat itu antar suku hidup berdampingan, aman atau lebih dikenal dengan ***Durable Peace***. Masa *durable peace* ini berlangsung ratusan tahun dengan pola saling memahami satu sama lain.

Kemudian, masuklah ke tahap kedua **Stable Peace**. Kedamaian yang stabil atau *stable peace* merupakan masa damai namun memiliki beberapa titik masalah potensial yang harus diperhatikan, karena saat itu mulai bergerak ke tahap ketidak stabilan. Lund (1996) menganggap bahwa masa *stable peace* hubungan komunikasi dan kerjasama masih terjaga, namun tetap saling mewaspadai antara kedua belah pihak.

Stable peace mulai nampak pada saat pemerintahan Mwami dari suku Tutsi menerapkan kebijakan yang semakin anti-Hutu. Kemudian pada tahun 1895, negara ini menjadi bagian dari provinsi Jerman sehingga membuat kondisi *stable peace* semakin meningkat. (www.hmd.org.uk) Jerman mendirikan protektorat pada tahun 1899 atas persetujuan Mwami, tetapi Jerman tidak lama berada di Rwanda kemudian pergi meninggalkan kawasan tersebut. Pecahnya Perang Dunia I membuat Jerman kehilangan wilayah Rwanda yang akhirnya ditempatkan di bawah administrasi Belgia oleh Liga Bangsa-Bangsa.

Memasuki tahap ketiga **Unstable Peace** yang terjadi saat kedua belah pihak saling mencurigai dan bersitegang satu sama lain. Saat ini, kekerasan belum terjadi secara signifikan, dan angkatan bersenjata belum sepenuhnya diterjunkan di lapangan. Namun, karena kedua belah pihak bersitegang, menyebabkan keduanya saling mempersiapkan diri dan mulai melakukan patroli sebagai bentuk kesiapan jika sewaktu-waktu terjadi pertempuran.

Kondisi *unstable peace* ini terjadi pada saat Belgia menguasai Rwanda. Belgia mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk menguasai wilayah Rwanda dan Burundi pada tanggal 23 Agustus 1923. (www.africa.upenn.edu) Belgia menerapkan rencana pembangunan sepuluh tahun, serangkaian reformasi sosial ekonomi yang luas untuk mendorong kemajuan politik dan stabilitas sosial. Namun, program ini kemudian memberikan dominasi politik, ekonomi, dan sosial kepada suku Tutsi yang minoritas daripada suku Hutu yang mayoritas.

Koloni Belgia lebih mengutamakan suku Tutsi dibandingkan dengan suku Hutu karena dianggap lebih kaya dan unggul. Saat menguasai wilayah tersebut pihak Belgia membedakan antara kedua suku dengan kartu identitas khusus yang berbeda. (Batwere. 2012, hlm. 1) Tindakan membedakan atau sistem kasta tersebut membuat ketegangan antara kedua belah suku semakin meningkat dan kondisi politik, ekonomi dan sosial masyarakat semakin tidak stabil.

Masa ke empat adalah *Crisis*. Fase ini terjadinya banyak konfrontasi dan ketegangan antar angkatan bersenjata dan terkadang terjadi penyerangan satu sama lain. Muncul berbagai ancaman dan pertempuran skala kecil yang terjadi di beberapa tempat, namun belum mengerahkan kekuatan militer secara total. Kondisi *crisis* ini intensitas peperangan dan kekerasan kedua belah pihak sangat tinggi dan dapat terjadi kapan saja.

Masa krisis ini terjadi pada tahun 1959 saat suku Hutu berusaha menggulingkan raja Tutsi yang sedang berkuasa pada saat itu. Kejadian tersebut memberikan dampak krisis yang besar terjadi di Rwanda. Pada saat Krisis ini, ribuan orang dari suku Tutsi menjadi korban, dan sekitar 150 ribu suku Tutsi terpaksa mengungsi ke negara tetangga seperti Kongo, Burundi, Tanzania, dan Uganda. (Batwere. 2012)

Pada tahun 1957, manifesto Hutu diterbitkan yang mengecam Tutsi dan menganggap posisi mereka yang lebih dominan dalam kepemimpinan di Rwanda. Ketika Raja Tutsi meninggal pada tahun 1959, suku Hutu yang didukung Belgia bangkit melawan kepemimpinan Tutsi. Kemudian pada tahun 1960, terjadi pemilihan langsung di Rwanda dan menghasilkan kemenangan kepada suku Hutu. Satu tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1961 Monarki dihapuskan dan di tahun 1962 Rwanda mendapatkan kemerdekaannya dari Belgia, dan George Kayibanda dari Partai Nasionalis Hutu berkuasa memimpin negara tersebut. (www.hmd.org.uk)

Masa krisis ini berlangsung beberapa tahun. Pada tahun 1963, Tutsi yang merasa dirugikan oleh Hutu berusaha menginvasi Rwanda tetapi berhasil dipukul mundur. Sebagai pembalasan atas perilaku pemberontakan tersebut, lebih dari 12.000 orang Tutsi dibantai oleh Hutu, sementara banyak orang Tutsi akhirnya meninggalkan negara tersebut dan mengungsi di beberapa negara tetangga sekitarnya. (www.africa.upenn.edu) pada masa krisis, terjadi sentimen suku yang kuat, suku Tutsi merasa tidak terwakili dalam politik, dan adanya sistem kuota etnis yang hanya memberikan mereka 9% dari pekerjaan yang tersedia mengakibatkan ketagangan antar suku semakin meningkat. Akhirnya terjadinya peningkatan di sektor perekonomian di Rwanda, dan meningkat juga tingkat kemiskinan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Selanjutnya adalah fase *War*, yang terjadi apabila upaya diplomasi tidak berhasil dan memasuki masa peperangan yang memungkinkan terjadinya banyak kekerasan di berbagai wilayah. Pertempuran antar angkatan bersenjata yang terorganisir antara kedua belah pihak sangat rentan memasuki tingkat yang paling besar secara habis-habisan, karena kedua belah pihak ingin menang dan menguasai pihak lain.

Setelah sekian rentetan peristiwa yang terjadi antara Hutu dan Tutsi, masuklah fase *war* yang tidak bisa lagi dihindarkan. Penyerangan dan pembantaian suku Hutu terhadap Tutsi membuat penduduk suku Tutsi yang berada di Uganda membuat *Rwandan Patriotic Front* (RPF). RPF berusaha memasuki wilayah Rwanda dengan membawa bendera demokrasi, *good governance*, dan protes atas kekerasan yang terjadi di masa lalu. Van Haperen (1994) menjelaskan bahwa tujuan utama RPF ini adalah untuk menggulingkan Presiden Habyrimana dari suku Hutu yang sedang memimpin Rwanda. Pada bulan Oktober 1990 pemberontakan RPF yang dipimpin oleh Paul Kagame memasuki menyerang Rwanda dari Uganda. Human Rights Wathc (2006) menjelaskan bahwa gerakan tersebut mengaku memperjuangkan hak pengungsi Tutsi untuk kembali ke rumah dan menggulingkan pemerintahan yang represif.

Sejak tahun 1991, 1992, dan 1993 sering terjadi konflik dan genjatan senjata antara kedua belah pihak. Kelompok RPF semakin kuat pengaruhnya di Rwanda membuat kelompok Habyarima bekerjasama dengan Prancis dan memobilisasi penduduk untuk membantu tentara Rwanda. Pada tanggal 6 April 1994 Presiden Habyarimana tewas karena pesawatnya ditembak oleh pihak RPF karena tidak setuju atas ide demokrasi di Rwanda yang diinisiasi oleh presiden Habyarimana. Peristiwa tewasnya presiden Rwanda tersebut membuat pasukan Rwanda, bekerjasama dengan para militan *Interahamwe* dan *impuzamagambi*. (Shelton, 2005)

Peristiwa kematian presiden Rwanda tersebut disiarkan oleh seluruh radio radikal Hutu dengan mengumumkan berita kematian, dan mendesak para masyarakat untuk menyerang Tutsi, sehingga genosida pun dimulai. (cla.umn.edu) Pembantaian besar-besaran terjadi dilakukan oleh militer dan militan Rwanda terhadap suku Tutsi. Lebih dari 800.000 orang dari suku Tutsi menjadi korban atas pembantaian tersebut. Artinya sekitar 84% populasi Tutsi dibantai habis pada tahun 1994. (Verpoorten, 2005.) (Britannica.com) ([Cla.umn.edu](http://cla.umn.edu)).

Untuk menyelesaikan genosida di Rwanda, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi 935 dan menyiapkan komisi khusus untuk menginvestigasi kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rwanda. PBB membuat pengadilan *ad hoc* karena permintaan dari Rwanda karena ingin menghukum semua pelaku kejahatan. *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) adalah pengadilan yang dibentuk atas keputusan DK PBB yang menanggapi kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rwanda.

KESIMPULAN

Tahap-tahap resolusi konflik yang terdiri dari *Durable Peace*, *Stable Peace*, *Unstable Peace*, *Crisis*, dan *War* dalam konflik antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda dapat disimpulkan sebagai berikut. Masa *durable peace* atau perdamaian yang bertahan lama berlangsung pada saat suku Twa, Hutu, dan Tutsi hidup berdampingan selama ratusan tahun. Memasuki masa *stable peace* atau kedamaian yang stabil dialahi pada

abad ke-18 saat mulai nampak pemerintahan Mwami dari suku Tutsi yang membuat kebijakan anti-Hutu. Saat Jerman datang ke Rwanda pada tahun 1895, kondisi antar suku yang sebelumnya damai mulai berangsur-angsur menuju kearah ketidakstabilan. Tahap ketiga, *unstable peace* diawali dari saling mencurigai antara kedua belah pihak. Kondisi ini terjadi saat Jerman meninggalkan Rwanda dan digantikan oleh Belgia yang menjadikan negara tersebut sebagai wilayah administrasi atas amanah dari LBB. Masuk ke tahap ke empat, *crisis* saat terjadinya konfrontasi dan ketegangan antar angkatan bersenjata kedua suku. Intensitas peperangan terjadi di beberapa kawasan namun belum secara luas dan menyeluruh. Masuk ke fase *war* dimana peperangan tidak dapat dihindari lagi setelah rentetan peristiwa terjadi sebelumnya. Fase pembantaian antar suku pun tidak dapat terelakkan dan menewaskan lebih dari 800.000 orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aall, Pamela. (1996). *Non Governmental Organizations and Peacemaking*. Dalam Crocker, Chaster A (et.al). *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict*. USIP Press. Washington. D.C.
- Anderson, Mary B. (1996). *Humanitarian NGOs in Conflict Intervension*” USIP Press. Washington, D.C.
- Africa.upenn.edu. (Tanpa Tahun) Rwanda—History. African Studies Center. University of Pennsylvania. <https://www.africa.upenn.edu/NEH/rwhistory.htm>
- Batware, Billy. (2012). *Rwandan Ethnic Conflict: A Historical Look at Root Causes*. European Peace University. Austria.
- Cla.umn.edu (Tanpa Tahun) Rwanda. College of Liberal Arts. Holocaust and Genocide Studies. University of Minnesota. <https://cla.umn.edu/chgs/holocaust-genocide-education/resource-guides/rwanda>
- Human Right Watch. (2006) *The Rwandan Genocide: How It Was Prepared: Context*. <https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/africa/rwanda0406/1.htm>
- Hmd.org.uk. (Tanpa Tahun). Life Before The Genocide. Holocaust Memorial Day Trust. Learning from Genocide – for a Better Future. <https://www.hmd.org.uk/learn-about-the-holocaust-and-genocides/rwanda/life-before-the-genocide/>
- Lund, Michael. McDonald, Steve. (2015). *Across the Lines of Conflict: Facilitating cooperation to Build Peace*. Columbia University Press. New York.
- Lund, Michael. (1996) *Preventing Violent Conflicts: A Strategy for Preventive Diplomacy* (Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
- Louscher, Gil dan Dwoty, Alan. (1996). *Refugee Glows as Grounds for International Action*. Dalam *International Security*. Volume 2, No. 1. Summer 1996.
- Mueller, John. (1989) *Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major War*. New York: Basic Books
- Mandat ICRC. <https://www.icrc.org/en/who-we-are/mandate>
- Shelton, Dinah L. (2005). *Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity*. Vol. 1-2.
- Shyaka. Anastase. (Tanpa Tahun) *The Rwandan Conflict. Origin, Development, Exit Strategies*. A Study ordered by: The Nation Unity and Reconciliation Commission. <https://repositories.lib.utexas.edu/server/api/core/bitstreams/8f5561a2-c08c-4bb4-9a94-e1838eb14baa/content>
- Usip.org. (Tanpa Tahun) Conflict Analysis. United States Institute of Peace. Making Peace Possible. <https://www.usip.org/academy/catalog/conflict-analysis>

- Usip.org (Tanpa tahun). *Conflict Analysis*. United States Institute of Peace.
<https://www.usip.org/academy/catalog/conflict-analysis>
- Van Haperen, Maria. (1994). *The Rwandan Genocide*.
- Verpoorten, Marijke. (2005). The Death Tool of the Rwandan Genocide: A Detailed Analysis for Gikongoro Province. *Journal Population*, Volume 60, Issue 5, 2005.
- Wohlfeld, Monica. (2010). *An Overview of the Conflict Cycle*. Mediterranean Academy of Diplomatic Studies. L-Universita ta Malta.
- Widjajanto, Andi. (2003). *Peran Masyarakat Sipil Dalam Resolusi Konflik*. Jurnal CIVIC, Volume. 1, No. 3, Desember 2003.